

TINJAUAN EKONOMI POLITIK BADAN USAHA MILIK DAERAH

Yandri Rahman Sauqi dan Muchid Albintani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Review of The Political Economy of the Badan Usaha Milik Daerah. PT. Riau Air Line (RAL) is enterprises with substantial investment and long, it's just that other forms of "patron" and the influence of the power of the elite, the political game style eventually led the airline's bankruptcy on the door. This paper aims to examine the extent of PT. RAL has become a political tool for the elite in the area. The method used is qualitative. The results showed the political economy of the local elite in the PT. RAL led to the idea to set up business in the field of air transport materialize. Local elites utilize PT. RAL for the sake of their political economy. PT RAL used as a "scapegoat" in the interest of wanting to straighten out the way implanted by the local elite. The impact of interference of local elites caused deterioration at PT. RAL.

Abstrak: Tinjauan Ekonomi Politik terhadap Badan Usaha Milik Daerah. PT. Riau Air Line (RAL) merupakan BUMD dengan investasi yang cukup besar dan panjang, hanya saja bentuk-bentuk "patron" dan pengaruh kekuasaan para elite, gaya permainan politik akhirnya mengantarkan perusahaan penerbangan ini pada pintu kepailitan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana PT. RAL telah menjadi sebuah alat politik bagi elite yang ada di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan ekonomi politik elit lokal pada PT. RAL menyebabkan gagasan untuk mendirikan bisnis di bidang transportasi udara terwujud. Elit lokal memanfaatkan PT. RAL untuk kepentingan ekonomi politik mereka. PT. RAL dijadikan "tumbal" dalam meluruskan jalan kepentingan yang ingin ditanamkan oleh elit lokal. Dampak campur tangan elit lokal ini telah menyebabkan kemunduran pada PT. RAL.

Kata Kunci: BUMD, campur tangan, ekonomi politik, elite lokal

PENDAHULUAN

PT. Riau Airlines (RAL) berdiri sejak tahun 2002 dengan pemegang sahamnya adalah pemerintah provinsi dan seuruh pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Riau. Termasuk pada waktu itu Kabupaten Kepulauan Riau yang di kemudian hari mekar menjadi provinsi sendiri. Pada awal pendiriannya, Riau Airlines difokuskan untuk menjadi jembatan udara yang menghubungkan daerah-daerah di Riau yang memang memiliki banyak infrastruktur bandara di kota dan kabupaten baik di Riau daratan maupun kepulauan. Seiring dengan kemajuan waktu dan tuntutan pasar, RAL mulai untuk membuka jalur penerbangan baru yang potensial, yang menghubungkan kota-kota di Riau dengan kota lain di luar Riau bahkan sampai ke negara tetangga Malaysia.

PT. RAL terbentuk tanggal 5 Maret 2002 dimana pada tanggal tersebut disahkan Peraturan Daerah No. 5 lembaran daerah No.7 tentang

Pembentukan PT. Riau Airlines oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Mendapat AOC (*Air Operation Certificate*) No. AOC/121-017 tanggal 20 Desember 2002 dari Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan. Pada 12 Maret 2002, RAL secara resmi berdiri yang ditandai dengan penandatanganan Akta Pendirian Nomor 14 oleh Gubernur Riau, Saleh Djasit, SH, di hadapan Notaris Asman Yunus, SH. Dalam akta tersebut ditunjuk Sekretaris Daerah Arsyad Rahim, BA selaku Komisaris Utama, serta Komisaris ditunjuk Asisten Ekbang dan Kesra Drs. Asparaini Rasyad dan Wan Galib.

Pendirian PT. RAL awalnya diharapkan dapat menjadi pemasukan tambahan (PAD) bagi Provinsi Riau sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun krisis demi krisis membuat maskapai ini kemudian jatuh pailit. Dimulai krisis keuangan tahun 2008 yang akhirnya memutuskan maskapai berhenti operasi tahun 2008. Setelah

dibenahi dan ditambah modal, maskapai ini kembali beroperasi pada Januari 2011. Tahun ini rute penerbangan dirubah Pekanbaru-Tanjung Pinang-Natuna dengan pesawat Boeing 737-500 yang disewa dari PT. Aero Nusantara Indonesia.

Pembahasan mengenai keberlanjutan sistem operasi bagi armada dari PT. RAL selalu menjadi bumerang pada rapat-rapat di tingkat legislatif. Hal ini disebabkan pemerintah harus menyediakan dana yang cukup besar untuk keberlanjutan sistem operasi maskapai ini. Padahal jika dikelola dengan baik seharusnya dapat memberikan kontribusi bagi daerah, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pro kontra tentang kehadirannya menjadi bahasan yang menarik di kalangan tokoh masyarakat maupun di tingkat legislatif sendiri.

Kondisi PT. RAL yang jatuh bangun menjadi tanda tanya sendiri di hati masyarakat Riau. Argumennya adalah jika tidak memberi keuntungan bagi daerah, mengapa pemerintah masih menopang keberlanjutan operasinya. Seharusnya pemerintah dapat mengalokasikan dana semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat pada bidang lainnya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, pembangunan gedung mewah dan dana operasional bagi PT. RAL tetap ditopang seakan-akan mengidentikkan bahwa Provinsi Riau merupakan “negeri kaya.”

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana PT. Riau Air Line telah menjadi sebuah alat politik bagi elite yang ada di daerah untuk meraih keuntungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk mengetahui bagaimana makna keberadaan PT. Riau Airline dalam pandangan warga masyarakat yang menjadi sasaran program berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan kajian ini lebih menekankan pada pola perilaku, tindakan/reaksi terhadap kebijakan dan interaksi sosial serta mempelajari tentang persepsi. Proses pengumpulan data mengandalkan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara

yang dilakukan melalui daftar pertanyaan secara mendalam dan bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pendirian PT. RAL

Tujuan dibentuknya PT. RAL adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Mantan Gubernur Riau, Saleh Djasit memandang bahwa untuk kelancaran transportasi bagi daerah-daerah di kepulauan adalah dengan mendirikan perusahaan daerah yang bergerak di bidang transportasi udara. Tetapi jika hanya tujuannya untuk menghubungkan daerah tanpa memikirkan lebih jauh biaya operasional yang dikeluarkan untuk mengurus transportasi udara, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya untuk menopang keberlanjutan PT. RAL.

PT. RAL merupakan satu-satunya penerbangan milik pemerintah yang terdapat di seluruh nusantara. Tidak semua daerah dapat mendirikan maskapai penerbangan karena dana yang dikeluarkan cukup besar. Oleh sebab itu, pendirian PT. RAL menjadi bahasan tersendiri baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif. Drs. H. Asparaini Rasyad yang merupakan Ketua Tim Teknis Persiapan PT. RAL menyatakan selama berlangsungnya proses kegiatan pendiriannya banyak sekali perhatian, saran, dan kritik yang diterima tim teknis, bahkan saran dan kritik itu juga ditujukan kepada Gubernur Riau. Hal itu dianggapnya wajar karena dana yang digunakan untuk mendirikan PT. RAL berasal dari dana APBD Provinsi Riau dan kabupaten/kota dalam bentuk penyertaan modal, yang nilainya relatif besar. Padahal disadari bahwa bisnis angkutan udara merupakan bisnis yang padat modal, padat teknologi, dan beresiko tinggi.

PT. RAL sebagai jembatan udara yang menghubungkan daerah-daerah di Riau sama sekali belum menjadi alternatif pilihan bagi Pemkab di Riau. Hal ini disebabkan banyak pengguna yang tidak tertarik menggunakan RAL karena penerbangan yang dilakukan belum maksimal.

Harus menunggu rute yang telah terjadwal sedangkan ada urusan yang mendadak harus segera sampai dan tidak bisa menunggu rute. Mereka lebih memilih menggunakan transportasi yang setiap waktu dapat digunakan seperti menggunakan transportasi darat ataupun transportasi laut.

Dana yang dikeluarkan oleh Pemda untuk pembentukan PT RAL menelan biaya yang cukup tinggi. Dalam pendiriannya, Pemda Riau bersama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemkab Kerinci (Jambi), dan Pemkab Nias (Sumut) serta yang terakhir bergabung yakni Pemkab Lingga. Hingga tahun 2008 Pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan dana melalui mekanisme penyertaan modal sebesar Rp80 milyar. Jumlah ini tercatat sebesar 52 persen saham Pemerintah Provinsi Riau yang saat ini telah tertanam di PT. RAL.

Pemda Riau telah mengeluarkan dana untuk keberlanjutan PT. RAL dengan dana penyertaan modal. Dana penyertaan modal yang dikeluarkan Pemda Provinsi Riau untuk keberlanjutan PT. RAL merupakan kegiatan yang tidak efektif. Dana penyertaan modal yang telah dikeluarkan Rp80 milyar tidak efektif untuk digunakan sementara masih banyak kegiatan bermanfaat lain yang bisa dikeluarkan. Sudah sepatutnya PT. RAL dikelola dengan baik manajemen baik dari segi operasional maupun dari segi dana. Hal ini untuk kemandirian PT. RAL sendiri dan untuk menjadikannya sebagai BUMD yang dapat membantu pemasukan daerah.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1962 Pasal 5 tentang Perusahaan Daerah dijelaskan mengenai tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Kesemuanya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS, H. Hasyim Aliwa menyebutkan, dana penyertaan modal yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau untuk keberlanjutan PT. RAL adalah tindakan

yang tidak efektif untuk situasi perekonomian saat itu. PT. RAL belum dapat menjadi perusahaan daerah yang dapat menjadi pemasukan daerah. Sepatutnya Pemprov Riau tidak memberikan bantuan kepada PT. RAL agar mereka dapat berpijak di kaki sendiri. Dari pernyataan ini menunjukkan sikap bertentangan dengan pihak eksekutif di Provinsi Riau. Penyertaan modal merupakan tindakan “menghambur-hamburkan” uang.

Campur Tangan Elit Lokal

Keinginan kuat Pemprov Riau untuk mendirikan PT RAL sebagai salah satu perusahaan daerah disinyalir menjadi ajang bagi elit lokal untuk menanamkan kepentingan ekonomi dan politiknya. Secara tidak langsung, orang akan bertanya mengapa dana yang begitu besar untuk pendirian PT. RAL dan biaya operasional yang tidak sedikit begitu mudah diluncurkan. Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau, Chaidir, mengatakan sejujurnya semula ia tidak begitu yakin dengan gagasan pendirian PT. RAL akan menjadi kenyataan. Sebab bisnis transportasi udara adalah sebuah bisnis yang memerlukan manajemen dengan kampuan teruji. Sementara SDM Riau rasanya belum siap untuk mengoperasikan sebuah maskapai penerbangan, apalagi di tengah persaingan bisnis penerbangan yang semakin tinggi. Salah satu alasan yang patut dipertimbangkan adalah masalah pengalaman. Namun setelah melalui pembahasan yang relatif cukup panjang, akhirnya disetujui juga oleh DPRD Provinsi Riau.

Campur tangan elit lokal di tubuh PT. RAL berakibat “kemandulan” PT. RAL. Sebagai perusahaan, sudah sepatutnya perusahaan ini memiliki manajemen yang profesional. Keprofesionalan kerja pada tubuh PT. RAL akan berdampak positif pada perkembangan dan kinerjanya. Jika terdapat campur tangan elit lokal, terlebih pemerintah daerah dalam kebijakan yang akan diambil, berakibat akan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Campur tangan elit lokal dapat dilihat atas pemberhentian Direktur Utama PT. RAL. Dalam jangka waktu dua tahun PT RAL telah mengalami dua kali pergantian Direktur

Utama. Pertama Heru Nurhayadi yang telah menjabat sejabat sebagai Dirut sejak tahun 2004. Agustus 2008 akhirnya diberhentikan oleh Komisaris PT. RAL karena pertimbangan telah terjadinya perselisihan yang tajam antara ia dengan karyawan. Heru digantikan oleh salah seorang Komisaris, Aspairani Rasyad. Ia kemudian diberikan tenggat waktu untuk menggelar *fit and propret test* guna mencari pengganti Heru.

Baru kemudian tanggal 5 November 2008 Dirut PT. RAL resmi dijabat Samudra Sukardi yang telah lolos dalam *proses fit and propret test* menyisihkan *Vice President* PT. Garuda Airlines. Kepemimpinan Samudera Sukardi ini hanya bertahan satu tahun. Tepat tanggal 2 Desember 2009, ia pun mengundurkan diri dan selanjutnya digantikan Teguh Triharyanto. Samudera mengundurkan diri karena terdapat perbedaan yang tidak lagi bisa diselesaikan menyangkut ekspektasi, model manajemen dan cara berkomunikasi. Ketika maju sebagai Dirut PT. RAL ia menginginkan maskapai ini menjadi *line* bisnis yang andal sehingga harus lepas dari campur tangan birokrat sebagai pemegang saham mayoritas. Karena itu kebijakan hendaknya penuh diserahkan pada korporasi. Jika suatu perusahaan banyak dicampuri oleh birokrat, perusahaan itu akan stagnan dan cenderung mengarah kepada sapi perahan kalangan birokrat. Itu sudah menjadi hal yang tidak bisa dielakkan.

Campur tangan dari pemerintah hanya akan membuat manajemen PT. RAL tidak dapat berfungsi dengan baik. Jika Dirut selalu didikte dalam melaksanakan tugas dan mengambil kebijakan tentu saja perusahaan tidak bisa berkembang dengan baik. Walaupun PT. RAL berdiri dikarenakan dana dari APBD, maka tidak sepatutnya pemerintah daerah ikut campur dalam urusan manajemen. Jika birokrat banyak mencampuri urusan perusahaan daerah, maka perusahaan daerah itu hanya menjadi “kambing hitam” untuk meluruskan kepentingan dari pejabat pemerintahan.

Hal lain yang dapat digambarkan dari campur tangan elit lokal terhadap operasional PT. RAL adalah pemanfaatan yang dilakukan pejabat dalam merekomendasikan orang-orang yang

akan menjadi karyawan. Mengenai hal ini, mantan Dirut PT. RAL, Heru Nurhayadi, menyebutkan secara manajemen PT. RAL tidak ada persoalan. Hanya saja problematikanya terlalu banyaknya tenaga kerja yang masuk hanya berdasarkan rekomendasi pemilik saham, bahkan pemimpin daerah sekalipun. Untuk tahap awal, persoalan memang tidak muncul, tetapi di kemudian hari karyawan tersebut menganggap seolah-olah perusahaan ini seperti layaknya milik orang tua mereka. Akibatnya teguran, aturan, dan disiplin kerja seperti kertas yang tidak berharga bagi mereka.

Campur tangan elit lokal pada PT. RAL menyebabkan berlakunya nepotisme, sehingga sangat sulit bagi Dirut PT. RAL untuk menegakkan kedisiplinan dan mengambil kebijakan. Nepotisme inilah yang kemudian menyebabkan kinerja PT. RAL menjadi tidak bagus. Mekanisme kerja yang seharusnya terjadi di perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik, karena karyawan seolah-olah mendapatkan “angin segar,” karena memiliki hubungan dengan pejabat, birokrat, ataupun elit lokal. Akibatnya perusahaan “jalan di tempat.”

Kepentingan Ekonomi Politik Elit Lokal

Kepentingan ekonomi politik disinyalir menjadi alasan elit lokal di Provinsi Riau ikut andil dalam pembentukan dan turut campur dalam masalah internal PT. RAL. Secara langsung ataupun tidak langsung, kehadiran PT. RAL telah menyerap dana APBD yang begitu besar dalam pendiriannya. Banyak orang bertanya-tanya mengapa pemerintah bisa meloloskan dana yang begitu besar untuk pendirian perusahaan daerah di bidang transportasi udara tersebut. Tentu saja terdapat alasan ekonomi politik dari elit lokal, sehingga pembentukan PT. RAL dan dana penyertaan modal untuk keberlangsungan PT. RAL itu sendiri.

Kepentingan ekonomi politik elit lokal ini menyebabkan gagasan untuk mendirikan bisnis di bidang transportasi udara terwujud. Elit lokal dapat memanfaatkan PT. RAL untuk kepentingan ekonomi politik mereka. PT. RAL dapat dianggap sebagai “tumbal” dalam meluruskan

jalan kepentingan yang ingin ditanamkan oleh elit lokal. Manajemen PT RAL tidak dapat berjalan dengan semestinya dikarenakan karyawan yang bekerja merupakan rekomendasi dari pejabat, birokrat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Bisa dikatakan bahwa PT RAL menjadi “perusahaan keluarga” dari elit lokal.

Perekrutan karyawan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. PT RAL sendiri harus menerima calon karyawan yang menjadi rekomendasi pejabat daerah. Padahal karyawan tersebut belum tentu diterima jika mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi banyak karyawan yang tidak sesuai kemampuan bekerja, sehingga hal ini menjadikan PT. RAL seolah-olah merupakan perusahaan keluarga.

Perekrutan karyawan tersebut merupakan salah satu contoh di mana elit lokal memiliki kepentingan politik, yaitu dapat menjadikan BUMD sebagai ajang untuk memainkan kekuasaan yang dimiliki dalam memasukkan keluarga mereka menjadi karyawan. Dengan jabatan yang mereka miliki di pemerintahan menjadi kekuatan untuk “memaksakan” keinginan mereka agar diikuti oleh pimpinan PT RAL. Kepentingan ekonomi yang terlihat adalah terdapat indikasi dimana dana yang “didungdungkan” mencapai Rp80 milyar hingga tahun 2008 untuk PT. RAL merupakan alat bagi elit lokal untuk memuluskan jalannya dalam meraup keuntungan. Dana fantastik yang harus dikeluarkan dari anggaran APBD tidak semuanya sampai ke PT. RAL. Pernyataan di media hanya sebagai kambing hitam agar pengeluaran dana APBD bisa diakui di mata masyarakat. Penyimpangan dana yang terjadi mengindikasikan bahwa terdapat kepentingan ekonomi dari elit lokal. Dengan adanya PT. RAL, maka elit lokal yang umumnya memiliki kekuasaan di daerah dapat menjadikannya sebagai ajang untuk mencari keuntungan.

Campur tangan yang dilakukan elit lokal tentu saja akan berdampak pada perkembangan PT. RAL itu sendiri. Campur tangan yang dilakukan oleh elit lokal bukan hanya pada usaha untuk menggolkan dana penyertaan modal, tetapi juga campur tangan dalam urusan kebijakan. Dengan

campur tangan yang dilakukan elit lokal ini menyebabkan kemunduran PT. RAL. Hal ini dapat dilihat dari pemecatan yang dilakukan terhadap Dirut PT. RAL. Dengan pemecatan yang dilakukan Komisaris terhadap Dirut PT. RAL tentu saja membuat perusahaan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Karena program kerja yang sudah dibuat menjadi tidak terlaksana karena Dirut yang membuat program tersebut telah berhenti. Pergantian Dirut yang tidak sistematis menjadikan program kerja tidak akan terlaksana dengan baik.

Campur tangan elit lokal dalam perkembangan PT. RAL adalah tidak baik. Campur tangan dari elit lokal pada perusahaan daerah pada umumnya menjadi ladang bagi penguasa untuk menanamkan kepentingan di dalamnya. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh elit lokal maka akan memudahkan jalan untuk memainkan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini pula yang juga disinyalir terjadi pada PT. RAL. Perusahaan daerah di bidang angkutan udara ini juga menjadi ajang bagi elit lokal untuk menghujamkan kepentingannya baik ekonomi maupun politik.

Dari awal elit lokal sudah memiliki tujuan tersendiri dari pendirian PT. RAL. Alokasi dana yang diperuntukkan bagi PT. RAL menjadi tanda tanya bagi masyarakat Riau. Seharusnya PT. RAL sudah dapat memberikan keuntungan setelah dana APBD banyak terkuras untuk pendirian dan dana operasional. Diperkirakan dana yang dikeluarkan tidak sepenuhnya masuk ke dalam PT. RAL. Diindikasikan dana tersebut juga telah mengalami pemotongan-pemotongan terlebih dahulu yang tentunya ada permainan elit lokal di dalamnya.

Vakumnya operasional pada PT. RAL merupakan tindakan yang tidak baik. Sebagai perusahaan daerah sudah sepatutnya pihak manajemen PT. RAL melaksanakan operasional agar mendapatkan pemasukan, sehingga dana yang sudah ditanamkan tidak terbuang dengan sia-sia. Dana yang terserap untuk PT. RAL bukanlah sedikit, oleh sebab itu perkembangannya menjadi perhatian bagi masyarakat. Dengan perusahaan daerah yang dimiliki, maka sudah seharusnya dapat memberikan pemasukan bagi daerah.

Tetapi dengan kevakuman yang terjadi pada PT. RAL tentu membuat masyarakat menjadi kecewa. Kekecewaan yang ditunjukkan tokoh masyarakat memunculkan ide untuk menutup perusahaan penerbangan ini.

Usulan penutupan ini dikarenakan ketidakmampuan dan kemandirian PT. RAL sendiri. Dana penyertaan modal harus selalu diberikan untuk keberlanjutan PT. RAL. Dana yang dikeluarkan sudah begitu besar, tetapi tidak membuahkan hasil kepada pemasukan daerah. Jika terus-terusan disubsidi, maka PT RAL tidak akan menjadi perusahaan yang mandiri dan tidak dapat memberikan kontribusi bagi daerah.

Kepentingan ekonomi politik elit lokal telah melumpuhkan jalan bagi PT. RAL untuk menjadi perusahaan daerah yang mandiri. Selama elit lokal masih memiliki kepentingan ekonomi politik, maka selamanya PT. RAL akan menjadi perusahaan daerah yang “jalan di tempat”, menjadi tidak profesional, dan tidak dapat menjadi perusahaan daerah yang dibanggakan. Karena itu, sudah sepatutnya pula bagi elit lokal untuk menyadari kekeliruannya selama ini.

SIMPULAN

Tinjauan ekonomi politik terhadap PT. Riau Air Lines mencakup terhadap awal pembentukannya, campur tangan elit lokal, dan kepentingan ekonomi politik elit lokal di Provinsi Riau. Awal terbentuknya PT. RAL adalah untuk kelancaran transportasi bagi daerah-daerah di kepulauan. Dana penyertaan modal yang dikeluarkan Pemrov Provinsi Riau hingga tahun 2008 sebesar Rp80 miliar. Ternyata dana untuk keberlanjutan merupakan kegiatan yang tidak efektif. Campur tangan elit lokal ternyata tidak efektif. Tidak efektif yang dimaksud di sini adalah

campur tangan pemerintah daerah berakibat “kemundulan” PT. RAL itu sendiri. Campur tangan dari pemerintah hanya akan membuat manajemen tidak dapat berfungsi dengan baik.

Kepentingan ekonomi politik elit lokal pada PT. RAL menyebabkan gagasan untuk mendirikan bisnis di bidang transportasi udara terwujud. Elit lokal memanfaatkan PT. RAL untuk kepentingan ekonomi politik mereka. PT. RAL dijadikan “tumbal” dalam meluruskan jalan kepentingan yang ingin ditanamkan oleh elit lokal. Dampak campur tangan elit lokal menyebabkan kemunduran. Campur tangan dari elit lokal pada perusahaan daerah pada umumnya menjadi ladang bagi penguasa untuk menanamkan kepentingan di dalamnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga
- Mallaranggeng, Rizal. 2000. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
- Moeleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Stainiland, Martin. 2003. *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Varma, SP., 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wibowo, Eddi, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)